



PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUNAN ANGGARAN DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013-2017

Nina Yulianasari Pedi Riswandi

Abstract. *In this study, we have studied the influence of the regional budget component (Regional Income and Excess Budget Calculation) on opportunistic behavior in Bengkulu Province. The important problem with this research is the fact that the level of corruption in Bengkulu Province is relatively high. For 3 consecutive periods the governor of Bengkulu province was entangled in corruption cases, while on the other hand the poverty rate in Bengkulu province was among the highest in Sumatera. The data used was secondary data and primary data. The population and samples in this study were regional revenue and expenditure budget (APBD) throughout the District and City of Bengkulu Province during the research period of 2013-2017 and 22 respondents from the legislature and executive as the budgeting party. The methods used were qualitative and quantitative. The results of the t-test showed that the regional income (PAD) variable has a probability value of 0.0000. If seen from the significance of $0.0000 < 0.05$, then Hypothesis 1 is accepted which means the regional income has an influence on the opportunistic behavior of budgeting in Bengkulu Province. The excess budget (SiLPA) obtains a probability of 0.0602 or greater than alpha 0.05, but smaller than alpha 0.10 at 90% confidence level. Thus, Hypothesis 2 is accepted which means that the excess budget (SiLPA) has an influence on the opportunistic behavior of budgeting in Bengkulu Province.*

Keywords: PAD, SiLPA, and Opportunistic Behavior of Budgeting

©2020 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Menurut Kamaliah (2010) Anggaran adalah rencana konkrit dan terintegrasi yang digunakan sebagai media pertama pemerintah dalam mengerjakan berbagai tanggung jawab serta kebijakan. Sumber daya yang tersedia relatif terbatas, sehingga APBD membuat rencana yang harus diakomodir. Hal ini membutuhkan ketepatan dan ketelitian dalam penyusunan anggaran.

Andvig, et al (2001) menyatakan jika ditinjau dari teori keagenan, proses penyusunan APBD adalah gambaran perjanjian antara pihak *principal* dan pihak agen. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil masyarakat bertindak sebagai *principal* diberikan kuasa untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Hal ini untuk

Nina Yulianasari(✉)

Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

Email : ninayulianasari26@gmail.com

Pedi Riswandi

Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang kemudian diakomodir dalam APBD. Dan pihak eksekutif sebagai agen dari kontrak tersebut. Menurut Halim dan Abdullah (2006); Latifah (2010) dan Abdullah (2012) menyatakan bahwa pihak eksekutif dapat mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Sebagai tujuan akhirnya yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran setiap warga negara Indonesia .

Permasalahan yang sering muncul pada saat penyusunan anggaran menurut Suryani (2012) adalah ketika beberapa pihak yang terlibat menggunakan peluang yang ada guna kepentingan idividu dan golongannya yang kemudian disusun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jumaidi (2014) menyatakan bahwa beberapa alasan tindakan oportunistik yang sering terjadi, diantaranya melakukan pengelompokan anggaran yang sudah direkayasa demi mewujudkan tujuan politiknya dan urusan pribadinya. Contohnya mengusulkan beberapa proyek tertentu untuk dapat memberikan keuntungan bagi pihak yang terkait didalam perencanaan anggaran. Selain itu perilaku yang lebih menginginkan realisasi penetapan anggaran atas beberapa proyek yang tidak susah untuk dilakukan tindakan korupsi dengan tujuan memperoleh timbal balik berupa pembayaran proyek yang relatif tidak kecil.

Penelitian terdahulu terkait tindakan oportunistik dalam penyusunan anggaran dapat dilihat dengan beberapa tindakan pihak legislatif. Untuk mewujudkan kepentingan politik dan individunya mereka melakukan tindakan mempengaruhi alokasi anggaran baik belanja infrastruktur maupun belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan proses yang dilihat dari kejadian yang ada, terkait proses penyusunan APBD. Proses penyusunan APBD merupakan proses bersama antara kedua belah pihak yaitu eksekutif dan legiskatif. Peneliti ingin melakukan penelitian terkait hubungan keagenan dengan meneliti nilai perilaku oportunistik yang terjadi akibat hubungan antara pihak legislatif dan eksekutif tersebut.

Menurut Oktriiniatmaja (2011) PAD adalah suatu alat yang digunakan pemerintah sebagai salah satu media penerimaan daerah untuk melayani masyarakat sebagai wujud pembiayaan pembangunan daerah. Dan Sularso (2014) menyatakan bahwa pihak legislatif akan meningkatkan target pendapatan dengan mendorong pihak eksekutif untuk meningkatkan alokasi anggaran sebagai wujud mendukung kepentingannya melalui program yang sudah dimodifikasi. SiLPA adalah suatu alat penerimaan pembiayaan pemerintah yang bisa dipakai untuk menutup defisit anggaran pada APBD. Nilai SiLPA tahun sebelumnya dapat diperoleh dari nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya yang disahkan. Menurut Asmara (2010) Proses mekanisme perubahan APBD merupakan salah satu alasan pihak legislatif dan pihak eksekutif untuk melakukan pengalokasian dana kembali (*rebudgeting*). Sedangkan Sularso (2014) menyatakan mengalokasikan SiLPA dapat memberikan tempat bagi untuk melakukan tindakan perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran.

Beberapa studi terdahulu juga menemukan bukti adanya perilaku oportunistik ini. Suartini, Ariyanto dan Ratna Sari (2016) dan Gumiadi (2016) mendapatkan bahwa terjadinya perbedaan Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif pada perilaku oportunistik penyusunan anggaran calon incumbent di Kabupaten/Kota se-Indonesia. Meskipun demikian, lebih lanjut hasil studi Siswati (2018) menemukan bahwa perilaku oportunistik justru berpengaruh positif terhadap



pertumbuhan ekonomi. Padahal dalam konteks teori keagenan, tingginya perilaku oportunistik penyusunan anggaran dapat mengindikasikan adanya penyimpangan-penyimpangan dan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Dari permasalahan yang ada, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang tindakan oportunistik. Sehingga, peneliti menduga bahwa: (1) adanya pengaruh positif PAD terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada Kota/Kabupaten di Propinsi Bengkulu tahun 2013-2017 dan (2) adanya pengaruh positif SiLPA terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada kota/kabupaten di Propinsi Bengkulu periode tahun 2013-2017.

LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan

Faria serta Silva (2013) mengatakan teori keagenan telah digunakan secara umum di berbagai sektor, yaitu sektor publik dan sektor swasta. Pelaku Ekonomi menggunakan teori keagenan dalam hal menganalisis hubungan antara pihak manajemen dan pihak karyawan. Dimana pihak manajemen selaku pihak prinsipal dan pihak karyawan sebagai pihak agen. Sementara menurut Latifah (2010) dan Abdullah (2012) penggunaan teori keagenan di sektor publik dilakukan dalam melakukan penyusunan penganggaran guna menganalisis hubungan antara pihak prinsipal dan pihak agen.

Latifah (2010) juga menyatakan bahwa persoalan dapat timbul antara pihak prinsipal dan pihak agen dengan adanya perbedaan informasi yang diperoleh (adanya asimetri informasi). Pihak agen memiliki info catatan terkait motivasi, hasil kinerja karyawan, serta capaian yang berpeluang menciptakan adverse selection dan *moral hazard*. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya jumlah *gap* catatan yang diperoleh baik pihak prinsipal dan pihak agen. Selain itu, menurut Faria dan Silva (2013) menyatakan bahwa pihak prinsipal belum dapat membedakan pihak agen tersebut melakukan tindakan yang benar ataupun tidak. Dalam hal ini biasanya pihak agen lebih memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menyembunyikan informasi yang ada.

Teori keagenan ini sudah dipraktekkan di sektor pemerintah, baik pusat maupun daerah. Setiap organisasi pemerintah sendiri mempunyai tujuan dalam melayani warga negara semaksimal mungkin demi memenuhi kehidupannya. Dimana pemerintah tidak diperkenankan melakukan pengalokasian serta pengelolaan potensi yang ada secara sepihak. Hal ini membuat pemerintah melakukan kebijakan dengan cara membagikan kekuasaan untuk pihak lain dalam mengolah potensi tersebut. Sehingga penyusunan anggaran dapat digunakan sebagai proses hal yang berharga dalam pengalokasian potensi tersebut. Hal ini juga dipicu oleh keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.

Jika diamati dari dua sudut pandang ikatan antara pihak legislatif dan warga negara; dan ikatan pihak eksekutif dan pihak legislatif, implikasi teori keagenan ini akan muncul ketika prosedur pembuatan anggaran dilakukan. Dimana menurut Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa ditinjau dari perspektif tersebut hubungan keagenan antara bagian legislatif dengan bagian eksekutif adalah bagian eksekutif selaku agen dan bagian legislatif selaku prinsipal.



2. Nilai Oportunistik Penyusunan Anggaran

Menurut Havid (2014) Oportunistik merupakan upaya dalam memperoleh kepentingan dengan segala berbagai cara baik itu legal maupun ilegal. Menurut Maryono (2013) kekuatan (power) dan kemampuan (ability) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku oportunistik.

Perilaku Oportunistik juga dikatakan sebagai cara menggunakan peluang yang ada. Adanya jabatan yang dipegang seseorang dapat mencapai kepentingan individunya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seyogyanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, justru dalam prakteknya program tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai pihak, baik pihak eksekutif maupun pihak legialatif. Dalam menentukan anggaran baik pihak eksekutif dan pihak legislatif akan berusaha mencapai kepentingan individunya dengan cara memanfaatkan jabatan yang dimilikinya tersebut.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber penghasilan daerah yang tergantung pada keadaan perekonomian pada umumnya. PAD juga merupakan pemasukan daerah yang diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, pengasilan industri milik daerah, penghasilan pengelolaan asset daerah yang dipecahkan, serta penghasilan asli daerah yang sah lainnya, Mardiasmo (2002:132). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan rutin yang berasal dari berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menggunakan berbagai macam kekuatan sumber keuangan dalam menyelenggarakan berbagai kewajiban dan tugasnya.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No.33 Tahun 2004 menyatakan asal penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuklain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan / atau jasaoleh daerah,



penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa anggaran merupakan simpanan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang tidak terpakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran atau tengah tersisa pada akhir tahun anggaran. Dengan menggunakan rencana anggaran berbasis kas, sisa anggaran sama dengan total uang Pemerintahan Daerah yang belum digunakan.

Sisa anggaran tahun lalu yang terdapat pada APBD tahun anggaran berjalan disebut juga SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) . SiLPA adalah penghasilan daerah yang berasal dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Contoh SiLPA pada APBD 2017 merupakan SiLPA tahun anggaran 2016. Sementara SiLPA pada APBD 2017 merupakan rencana sisa anggaran pada akhir tahun 2017, yang bakal menjadi tetap pada saat Peraturan Daerah mempertanggungjawabkan aplikasi APBD telah dilaksanakan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi pemasukan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode anggaran. Adapun cakupan SiLPA diantaranya pelimpahan realisasi PAD dari yang ditargetkan, pelimpahan pemasukan dana perimbangan dari pemerintah pusat, pelimpahan pemasukan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelimpahan pemasukan pembiayaan, efisiensi pada belanja daerah, belum diselesaikannya hutang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai batas akhir tahun anggaran berjalan serta sisa dana kegiatan tambahan.

METODOLOGI

Sifat pada penelitian ini yaitu deskriptif. Sugiyono (2012:13) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah studi yang dilakukan demi melihat nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih variabel independen tanpa membentuk perbedaan. Selain itu studi ini juga memakai pendekatan analisis kuantitatif berupa statistik inferensial. Untuk mendukung hasil analisis kuantitatif, studi ini juga memakai analisa kualitatif.

Jenis bahan yang dipakai untuk studi ini berupa data sekunder (data panel), diantaranya pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan nilai oportunistik penyusunan anggaran (OPA) Daerah pada laporan realisasi APBD Pemerintah Kota/Kabupaten di Propinsi Bengkulu tahun 2013-2017 (sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu). Selain data sekunder untuk mendukung studi ini juga menggunakan data primer berbentuk kuesioner dengan responden sebanyak 22 orang yang merupakan perwakilan dari pihak eksekutif dan legislatif sebagai pelaku dalam menyusun anggaran.

Pada penelitian ini pengukuran nilai OPA dikembangkan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Abdullah (2012), dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung alokasi anggaran belanja dari APBD tahun berjalan ke tahun



sebelumnya.

Perhitungan () = APBD tahun berjalan (t) – APBD tahun **sebelumnya (t-1)**.

Sektor-sektor yang diamati untuk mengukur nilai oportunistik penyusunan anggaran adalah () pendidikan, () kesehatan, dan () pekerjaan umum. Mengagregasikan atau menggabungkan yang menunjukkan OPA secara keseluruhan, dengan perhitungan:

OPA = () Pendidikan + () Kesehatan + () Pekerjaan Umum.

2. PAD = () PAD tahun berjalan (t) – PAD tahun sebelumnya (t-1). 3. SiLPA = () SiLPA tahun berjalan (t) – SiLPA tahun sebelumnya (t-1)

Pada studi ini menggunakan data panel karena mempunyai karakteristik data *cross section* serta *time series*. Maka dalam penelitian ini dibantu oleh Program Komputer Eviews 8.0 dengan beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam pengolahan data. Selain analisis kuantitatif, studi ini juga memakai metode deskriptif kualitatif, dilakukan melalui penjelasan data-data di lapangan, dianalisis lalu ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL ANALISIS

A. Analisis Kuantitatif

Hasil analisis kuantitatif berlandaskan masukan data yang didapat serta diolah dengan memakai program Eviews 8.0 adalah sebagai berikut:

Model Estimasi

1). *Common effect Model atau Pooled Least Square (PLS)*

Tabel 1 Hasil Common effect Model atau Pooled Least Square (PLS)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.10E+11	5.39E+10	7.606145	0.0000
PAD	9.503143	1.995582	4.762091	0.0000
SILPA	1.449139	0.754154	1.921544	0.0602
R-squared	0.313566	Mean dependent var		5.42E+11
Adjusted R-squared	0.287165	S.D. dependent var		4.03E+11
S.E. of regression	3.40E+11	Akaike info criterion		55.99453
Sum squared resid	6.01E+24	Schwarz criterion		56.10402
Log likelihood	-1536.850	Hannan-Quinn criter.		56.03687
F-statistic	11.87691	Durbin-Watson stat		2.210746
Prob(F-statistic)	0.000056			

Melalui gambar tabel di atas memperlihatkan Angka R-Square sebesar 0,313566 yang melihat kekuatan variasi nilai panel yang mengartikan variasi profitabilitas sebesar



31,35 % saja, dan sisanya sebesar 68,64 % dijelaskan dengan variabel yang lain tidak dimasukkan ke dalam persamaan. Koefisien total SiLPA tidak signifikan dikarenakan nilai probability lebih besar dari alpha ($0,0602 > 0,05$), namun dengan tingkat kepercayaan 90% atau 0,1 jumlah SiLPA menjadi signifikan. Sementara nilai PAD memperlihatkan nilai yang signifikan, disebabkan nilai probabilitinya kurang dari alpha ($0.0000 < 0.05$)

2). *Fixed effect model*

Tabel 2 Hasil Fixed effect model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.63E+11	6.17E+10	7.496694	0.0000
PAD	5.785988	2.934290	1.971853	0.0552
SILPA	1.261442	0.771633	1.634769	0.1096
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.451388	Mean dependent var	5.42E+11	
Adjusted R-squared	0.294641	S.D. dependent var	4.03E+11	
S.E. of regression	3.38E+11	Akaike info criterion	56.13405	
Sum squared resid	4.80E+24	Schwarz criterion	56.60851	
Log likelihood	-1530.686	Hannan-Quinn criter.	56.31753	
F-statistic	2.879731	Durbin-Watson stat	2.691739	
Prob(F-statistic)	0.005546			

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah R-Square sebesar 0,451388 mengartikan bahwa kekuatan variasi nilai panel dengan variasi profitabilitassebesar 45,13% saja, sementara sisanya sebesar 54,87% dijelaskan dengan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. Koefisien PAD serta SiLPA secara bersamaan tidak signifikan disebabkan nilai probabilitinya lebih besar dari pada alpha (0.0552 dan $0.1096 > 0.05$).



3). Random Effect Model

Tabel 3 Hasil Random effect model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.10E+11	5.36E+10	7.646350	0.0000
PAD	9.503143	1.985089	4.787262	0.0000
SILPA	1.449139	0.750188	1.931701	0.0589
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			3.38E+11	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.313566		Mean dependent var	5.42E+11
Adjusted R-squared	0.287165		S.D. dependent var	4.03E+11
S.E. of regression	3.40E+11		Sum squared resid	6.01E+24
F-statistic	11.87691		Durbin-Watson stat	2.210746
Prob(F-statistic)	0.000056			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.313566		Mean dependent var	5.42E+11
Sum squared resid	6.01E+24		Durbin-Watson stat	2.210746

Dari gambar tabel tersebut memperlihatkan jumlah R-Square sebesar 0,313566 yang mengartikan bahwa kekuatan variasi nilai panel dijelaskan oleh variasi profitabilitas sebesar 31,35% saja, sementara sisanya sebesar 68,65% dijelaskan dengan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. Koefisien total SILPA menunjukkan tidak signifikan disebabkan nilai probabilitasnya lebih besar dari alpha ($0,0589 > 0,05$), sementara hasil PAD menunjukkan signifikan disebabkan nilai probabilitasnya kurang dari alpha ($0.0000 < 0.05$)



4). Uji Hausman

Tabel 4 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.266335	2	0.1953

Berlandaskan masukan data yang telah diolah memperlihatkan angka Probability pada Cross-section Random lebih besar dari pada nilai alpha ($0.1953 > 0.05$). Jadi H_0 ditolak dan H_a diterima, maka metode yang baik yaitu Random Effect.

5). Uji Lagrange Multiplier

Tabel 5 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.153868	1.947666	2.101534
	(0.6949)	(0.1628)	(0.1472)

Berdasarkan uji Lagrange Multiplier yang sudah diolah, hasil outpunya dapat dilihat pada tabel di atas. Melalui gambar tabel tersebut menunjukkan nilai probabilitas dari **Breusch-Pagan** sebesar 0.6949 atau lebih besar dibandingkan dari 0,05. Jadi keputusan yang diambil yaitu H_0 diterima serta H_a ditolak, sehingga model yang dipakai yaitu Common effect Model

B. Estimasi Regresi Data Panel

Metode yang biasanya dipakai untuk menestimasi model regresi dengan data panel adalah pooling least square (Common Effect), pendekatan efek tetap (Fixed Effect), pendekatan efek random (Random Effect) Widarjono (2009).

Berdasarkan F Test, memperlihatkan bahwa nilai signifikansi F test sebesar 0,41 atau lebih besar dari alpha 0.05, dengan demikian hasil ini menunjukkan bahwa model OLS (Common Pool) lebih sesuai digunakan daripada model Fixed Effect. Selanjutnya Hasil Hausman test mendapatkan nilai Probabilitas Chi square sebesar 0,19 atau lebih besar daripada alpha 0.05. Artinya Model estimasi Random Effect lebih baik digunakan dibandingkan dengan Model Fixed Effect.

Dari kedua pengujian tersebut, diketahui bahwa Model OLS (Common Pool) dan Random Effect sama- sama merupakan model estimasi yang lebih baik dibandingkan dengan Fixed Effect. Oleh sebab itu, maka perlu pengujian Lagrange Multiplier (LM) test untuk menentukan model yang paling sesuai. Hasil LM Test memperlihatkan bahwa nilai Signifikansi LM sebesar 0,14 atau lebih besar daripada Alpha 0,05. Dengan



demikian, model OLS (Common Pool) merupakan model yang bisa dipakai untuk studi ini dibandingkan dengan Random Effect.

C. Metode Regresi Linier Berganda

Penelitian ini juga memakai analisis regresi linier berganda. Analisis Regresi Linier Berganda berguna untuk mengetes pengaruh dua atau lebih variabel Independen terhadap variabel Dependen. Pada tabel dibawah ini menunjukkan hasil analisis regresi berganda.

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.10E+11	5.39E+10	7.606145	0.0000
PAD	9.503143	1.995582	4.762091	0.0000
SILPA	1.449139	0.754154	1.921544	0.0602
R-squared	0.313566	Mean dependent var		5.42E+11
Adjusted R-squared	0.287165	S.D. dependent var		4.03E+11
S.E. of regression	3.40E+11	Akaike info criterion		55.99453
Sum squared resid	6.01E+24	Schwarz criterion		56.10402
Log likelihood	-1536.850	Hannan-Quinn criter.		56.03687
F-statistic	11.87691	Durbin-Watson stat		2.210746
Prob(F-statistic)	0.000056			

Model Regresi Linier Berganda yang dihasilkan yaitu sebagai berikut: $Y = 4,10 + 9,503 + 1,449 + e$

Berdasarkan model Regresi Linier Berganda di atas menunjukkan bahwa Nilai konstanta yang diperoleh adalah 4,10 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Jadi jumlah Nilai perilaku oportunistik penyusunan anggaran yang diperoleh sebesar 4,10%. Koefisien X1 sebesar 9,503 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% X1 maka diperkirakan Y akan meningkat sebesar 9,503% dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai tetap. Koefisien regresi X2 bernilai 1,449 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% X2 maka diperkirakan Y akan meningkat sebesar 1,449% dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.



D. Uji Statistik Uji T dan Uji F

Tabel 7 Hasil Uji T dan F

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.10E+11	5.39E+10	7.606145	0.0000
PAD	9.503143	1.995582	4.762091	0.0000
SILPA	1.449139	0.754154	1.921544	0.0602
Prob(F-statistic)	0.000056			

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000. Jika dilihat melalui taraf signifikansi $0,0000 < 0,05$. Berdasarkan dengan aturan pengambilan keputusan, jadi Hipotesis 1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Perilaku opportunistik penyusunan anggaran di Propinsi Bengkulu.

Begitu juga variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang memperoleh probabilitas 0,0602 atau lebih besar dari alpha 0,05, tetapi lebih kecil dari alpha 0.10 atau tingkat kepercayaan 90%. Dengan demikian maka Hipotesis 2 diterima yang berarti bahwa SiLPA memiliki pengaruh terhadap Perilaku opportunistik penyusunan anggaran di Propinsi Bengkulu.

Berdasarkan pengolahan uji F menunjukkan nilai probabilitas F sebesar 0,000056. Dengan taraf signifikansi 5% sehingga uji F signifikan. Jadi bisa disimpulkan PAD dan SiLPA memiliki pengaruh terhadap Perilaku opportunistik penyusunan anggaran di Propinsi Bengkulu

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Perilaku opportunistik penyusunan anggaran di Propinsi Bengkulu.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki angka probabilitas sebesar 0,0000. Jika dilihat melalui taraf signifikansi $0,0000 < 0,05$. Berdasarkan aturan pengambilan keputusan, jadi Hipotesis 1 diterima yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Perilaku opportunistik penyusunan anggaran di Propinsi Bengkulu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan artinya memiliki pengaruh terhadap Perilaku Opportunistik di Propinsi Bengkulu. Selain itu juga diperkuat dengan hasil analisis kualitatif yang menunjukan lebih dari 50% responden menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap perilaku opportunistik penyusunan anggaran. Kenaikan PAD dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan dapat mempengaruhi alokasi belanja pada bagian-bagian tertentu yang bisa membagikan manfaat untuk penyusunan anggaran. Penelitian ini sejalan dengan Sularso,dkk (2014) yang menyatakan bahwa kelompok legislatif hendak memaksa kelompok eksekutif untuk menaikkan alokasi anggaran dalam programnya demi mendukung kepentingannya dengan cara



meningkatkan pendapatan. Hal ini juga selaras dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya Suartini, Ariyanto, dan Ratna Sari (2016); Gumiadi (2016); dan Siswati (2018) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

B. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran di Propinsi Bengkulu.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang memperoleh probabilitas 0,0602 atau lebih besar dari alpha 0,05, tetapi lebih kecil dari alpha 0.10 atau tingkat kepercayaan 90%. Dengan demikian maka Hipotesis 2 diterima yang berarti bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) memiliki pengaruh terhadap Perilaku oportunistik penyusunan anggaran di Propinsi Bengkulu. Sehingga dapat disimpulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) juga berdasarkan hasil analisis kuantitatif menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran di Propinsi Bengkulu. Hasil ini juga didukung oleh analisis kualitatif yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden menyatakan bahwa adanya pengaruh SiLPA terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Pihak eksekutif dan legislatif mempunyai perbedaan informasi terkait SiLPA terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Keadaan ini selaras atas studi yang dilakukan Asmara (2010) yang menunjukkan pengalokasian dana kembali menjadikan kondisi baik pihak legislatif dan pihak eksekutif melalui mekanisme perubahan APBD. Dan Sularso, dkk (2014) menyatakan bahwa dapat melakukan perilaku oportunistik dengan cara mengalokasikan SiLPA.

SiLPA mempunyai skala terbaik atas pembiayaan daerah. Nilai SiLPA yang tinggi dikarenakan akibat belum masuknya semua anggaran yang dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah Daerah yang menggambarkan agen atau perwakilan prinsipal, seandainya mengerjakan APBD dengan benar sebaiknya tidak akan menciptakan SiLPA. Studi ini selaras dengan studi-studi terdahulu diantaranya Suartini, Ariyanto, dan Ratna Sari (2016); Gumiadi (2016); dan Siswati (2018) yang menunjukkan SiLPA berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

C. Pengaruh PAD dan SiLPA terhadap Perilaku oportunistik penyusunan anggaran di Propinsi Bengkulu.

Hasil uji F menunjukkan angka probabilitas F sebesar 0,000056. Dengan taraf signifikansi 5%, maka uji F signifikan. Jadi ditarik kesimpulan PAD serta SiLPA memiliki pengaruh terhadap Perilaku oportunistik penyusunan anggaran di Propinsi Bengkulu.

Berdasarkan nilai Adjusted R Square menunjukkan angka koefisien determinasi adjusted (R^2) sebesar 0,287 yang berarti bahwa 28,7% persen perubahan baik atau turunnya Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran di Propinsi Bengkulu dapat dijelaskan oleh indikator-indikator terjadinya Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran yaitu PAD dan SiLPA. Keadaan ini juga selaras dengan hasil analisis



kualitatif yang memperlihatkan lebih dari 50% responden menyatakan bahwa adanya pengaruh PAD dan SiLP terhadap Perilaku Opportunistik Penyusunan Anggaran. Perbedaan kebutuhan antara kelompok eksekutif dan kelompok legislatif menjadi hal utama pada penyusunan anggaran sehingga menimbulkan perilaku opportunistik, hal ini dilakukan dengan cara memodifikasi penyusunan anggaran.

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki angka probabilitas sebesar 0,0000. Jika dilihat melalui taraf signifikansi $0,0000 < 0,05$. Berdasarkan aturan pengambilan keputusan, maka Hipotesis 1 diterima yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Perilaku opportunistik penyusunan anggaran di Propinsi Bengkulu. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang memperoleh probabilitas 0,0602 atau lebih besar dari alpha 0,05, tetapi lebih kecil dari alpha 0.10 atau tingkat kepercayaan 90%. Dengan demikian maka Hipotesis 2 diterima yang berarti bahwa SiLPA memiliki pengaruh terhadap Perilaku opportunistik penyusunan anggaran di Propinsi Bengkulu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Authors thanks to KEMENRISTEKDIKTI-BRIN for the financial support to through Project No. 182/SP2H/LT/DRPM/2020 (Penelitian Dosen Pemula).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2012). Perilaku Opportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor Yang mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia. Ringkasan Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Agus, Widarjono. 2009. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasi, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonesia.
- Asmara, J.A. (2010). Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol 3 No 2. Juli 2010 Hal 155-172.
- Andving, Jens Chr., Odd- Helge Fjeldstad, Inge Amundsen. Tone Sissener & Tina Soriede. (2001). Corruption A Review of Contemporary Research. *Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Right Report* R 2001:7.
- EvIEWS 8, aplikasi.
- Faria, J.A., dan Silva, S.M.G. (2013) The Effects of Information Asymmetry on Budget Slack: An Experimental Research. *African Journal of Business Management* vol 7(13) ,pp.1086-1079.
- Gujarati, D.N. dan Porter, D.C. (2015). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat
- Gumiadi, Aan. (2016). Determinan Perilaku Penyusunan Anggaran (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). Skripsi: Universitas Muhammadiyah



Surakarta.

- Halim, A. dan Abdullah, (S. 2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah 2* (1): 53-64.
- Jumaidi, L.T. (2014). Perilaku Legislatif dalam Praktik Penganggaran dengan Pendekatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram Lombok 24- 27 September 2014*.
- Kamaliah, Edfan Darlis, dan Viorita Virsanita (2010). Pengaruh Perilaku Oportunistik Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Pegawai Pemerinrah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Provinsi Riau). *Jurnal Ekonomi Vol 18 Nomor 2*, Hal 50-62.
- Latifah, N.P. (2010). Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik ?. *Fokus Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2010* : 85 94.
- Mardiasmo.(2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maryono, R. (2013). Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. *E-Jurnal UNP*.
- Oktriniatmaja, Rini. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Repository: Universitas Sebelas Maret.
- Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengrlolaan Keuangan Daerah.
- Siswati, Susi. (2018). Perilaku Oportunistik penyusunan Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *JRMB Volume 13 No 2*.
- Suartini, Ariyanto, dan Ratna Sari. (2011). Determinan Perilaku Oportunistik Penyusunan

